

BAB I

PENDAHULUAN

Kebuntuan pikiran dan kebingungan yang akut mungkin adalah hal yang amat biasa terjadi di setiap mahasiswa yang menempuh studi Ilmu Hubungan Internasional ketika akan menentukan topik apa yang akan mereka ambil sebagai tema besar untuk pengerjaan skripsinya. Alasannya sederhana, studi Ilmu Hubungan Internasional memiliki keterkaitan dengan hampir semua ilmu sosial yang ada, yaitu Ekonomi, Ilmu Politik, Psikologi Sosial, Filsafat, Sosiologi, hingga Ilmu Hukum.

Belum lagi keragaman isu-isu yang dapat diangkat seperti isu-isu yang tergolong klasik, seperti isu keamanan, politik luar negeri, diplomasi, ekonomi politik, hingga isu-isu yang dapat dikatakan sebagai isu kontemporer, seperti isu lingkungan dan gender. Banyaknya pilihan inilah yang membuat penulis sempat terjebak pada kebingungan pemilihan topik hingga jangka waktu yang cukup lama. Hingga di satu fase waktu akhirnya penulis mulai berhubungan cukup intim dengan pemikiran-pemikiran Joseph E Stiglitz melalui buku-bukunya yang banyak membahas globalisasi dan berbagai persoalannya.

Di Indonesia, globalisasi telah menjadi polemik yang tidak berkesudahan. Di satu sisi, globalisasi banyak dipuja karena membawa berbagai keajaiban terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Namun di sisi lainnya, banyak juga yang menganggap bahwa globalisasi adalah yang harus bertanggung jawab karena telah merusak budaya nasional, menghadirkan dekadensi moral, serta membuat carut marut dalam struktur ekonomi politik.

Penulis pun akhirnya memutuskan untuk mengambil tema Ekonomi Politik, dengan melakukan tinjauan ideologis yang dipakai dalam pengambilan kebijakan Ekonomi Indonesia pada masa Pemerintahan setelah tumbangnya rezim Orde Baru. Di dalam Skripsi yang diberi judul “**Globalisasi dan Kebijakan Ekonomi Indonesia Pasca Orde Baru : Perspektif Joseph E. Stiglitz**” ini penulis mencoba memaparkan pemikiran-pemikiran Stiglitz yang sekiranya memiliki keterkaitan dengan kondisi perekonomian Indonesia pada era setelah tumbangnya rezim pemerintahan Presiden Soeharto. Era yang tak dapat kita pungkiri masih banyak memiliki kekurangan dan kelemahan yang berujung pada timbulnya permasalahan berupa gonjang-ganjing dalam situasi perekonomian dan perpolitikan nasional. Dan akhirnya kalimat terakhir barusan pun menjadi alasan utama mengapa penulis tertarik dan berminat serius untuk memilih tema ekonomi politik sebagai kajian utama di dalam menulis skripsi.

A. Tujuan Penelitian

Suatu penelitian atau kajian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena persoalan tertentu. Maka dari itu, penulisan skripsi ini memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Mengetahui bagaimana sisi buruk dari proses globalisasi, yang membonceng penyebaran ide-ide neoliberalisme dan tercermin didalam poin-poin *Washington Consensus*. Dalam hal ini khususnya yang terjadi di Indonesia.

2. Mencoba mereformulasikan kebijakan ekonomi Indonesia yang terkait dengan agenda neoliberalisme di era globalisasi, dengan menggunakan perspektif Joseph E. Stiglitz.
3. Sebagai sarana implementasi teori-teori hubungan internasional pada kasus aktual seperti masalah ekonomi politik, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional.
4. Untuk kelengkapan dalam memperoleh gelar kesarjanaan pada jurusan Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Memunculkan kembali pertanyaan apakah benar ada makna kebaikan yang terkandung di dalam globalisasi mungkin terasa tak lagi tepat bagi sebagian kalangan. Setidaknya, dengan melihat kondisi peradaban dunia yang saat ini mengalami perkembangan pesat dengan hadirnya kemajuan teknologi yang mungkin tak pernah terpikirkan sebelumnya, yang juga dengan mudah ditransfer ke berbagai pelosok dunia, telah menjawab tuntas pertanyaan tersebut. Globalisasi yang juga membonceng ide-ide fundamentalisme pasar tersebut kini seolah telah menjadi sebuah obat mujarab bagi permasalahan yang hadir dalam hajat hidup umat manusia. Hal ini tentu turut memberikan para intelektual pendukung utama globalisasi sebuah legitimasi, bahwa inilah jalan terbaik yang harus ditempuh dalam mewujudkan cita-cita membangun peradaban umat manusia yang lebih baik. Apalagi dengan ditambah suksesnya

proses demokratisasi di berbagai penjuru dunia pada beberapa dekade belakangan, semakin memantapkan kemenangan kaum pendukung globalisasi yang mengusung nilai-nilai demokrasi.

Seorang ekonom Hongaria bernama Janos Kornai, dalam sebuah artikel berjudul *What the Change of System from Socialism to Capitalism Does Not Mean* yang dimuat di *Journal of Economics Perspective* yang terbit pada musim dingin pada Tahun 2000 menulis bahwa “*tidak pernah ada negeri dengan suasana politik demokratik, dulu atau sekarang, yang ekonominya tidak didominasi oleh hak milik pribadi dan koordinasi pasar*” (Wolf, 2007 p. 26). Pernyataan ini menemui pembenarannya ketika melihat bagaimana pergulatan yang terjadi di ruang-ruang kehidupan berkenegaraan. Kehidupan makin disesaki dengan wujud-wujud manusia yang terus mengejar kepuasan pribadi dalam sebuah sistem pasar yang bersaing sempurna. Manusia telah terbebas dari kungkungan pemerintahan-pemerintahan diktator. Demokrasi telah menjadi pemenang di hampir seluruh penjuru dunia, dan itupun turut dibarengi dengan semakin kokohnya praktik-praktik ekonomi yang berbasis pasar bebas, yaitu praktik ekonomi yang mengamini kekuatan individu untuk terus mengakumulasikan modal melalui kegiatan pencarian *profit* yang tanpa batas dalam sirkuit kapital.

Di tahun 1992, seorang akademisi Amerika Serikat bernama Francis Fukuyama menerbitkan sebuah buku yang menggemparkan dunia berjudul *The End of History and The Last Man*. Dengan merunut pada filsafat sejarah universal Hegel dan dengan melihat keruntuhan pemerintahan komunis Uni

Soviet, Fukuyama menuliskan bahwa sejarah dunia telah berakhir, kapitalisme beserta demokrasi liberal telah muncul sebagai pemenang, dan perdebatan yang bersifat ideologis pun telah selesai.

Menurutnya, kabar baik telah datang, perkembangan yang luar biasa dalam seperempat abad terakhir pada abad ke-20 telah membuka rahasia yang sangat besar mengenai kekurangan-kekurangan dalam inti dunia seperti kelemahan para diktator, baik mereka merupakan kelompok militer otoritarian kanan, maupun totalitarian-komunis kiri. Dari Amerika Latin sampai Eropa Timur, dari Uni Soviet sampai Timur Tengah dan Asia, Pemerintahan-pemerintahan yang kuat telah gagal pada dua dasawarsa terakhir ini. Sementara mereka tidak menemukan jalan menuju demokrasi liberal yang stabil, demokrasi liberal tetap hanya merupakan aspirasi politik koheren yang menjangkau perbedaan wilayah dan budaya di seluruh dunia. Di lain hal, prinsip-prinsip liberal dalam ekonomi pasar bebas telah menyebar, dan telah berhasil memproduksi kesejahteraan material yang belum pernah dicapai sebelumnya, keduanya terjadi di negara-negara industri dan di negara-negara berkembang, yang menjelang perang dunia II masih merupakan negara-negara dunia ketiga yang sangat miskin. Sebuah revolusi liberal dalam pemikiran ekonomi kadang-kadang mendahului, dan kadang-kadang mengikuti gerakan menuju kebebasan politik di seluruh dunia (*Fukuyama, 1999 p. 4*).

Masyarakat dunia mungkin tidak dapat mengelak untuk tidak mengiyakan pendapat Fukuyama tersebut. Dunia memang telah berubah drastis di fase terakhir abad ke-20, mungkin inilah masa karnaval bagi pencinta demokrasi

dan pasar bebas. Demokrasi sendiri tentu memang tidak dapat dipungkiri lagi keampuhannya, setiap individu sejatinya tentu mendambakan terciptanya iklim kehidupan demokratis, karena mungkin begitulah hakikatnya manusia. Lalu bagaimana dengan pasar bebas? Mungkin Fukuyama juga benar, di dalam era globalisasi ini, kehidupan manusia berjalan makin kompleks dalam setiap sendinya, apalagi manusia memang seolah digiring menuju interaksi yang begitu padat untuk memenuhi perihal kebutuhannya. Untuk itu gejala pasar bebas mungkin tak dapat dihindari lagi.

Namun dalam perspektif yang jauh berseberangan dengan apa yang sebelumnya terlihat dari para pendukungnya, ternyata globalisasi juga memiliki para penentang yang sangat setia. Dengan melihat krisis ekonomi yang begitu parah melanda Asia pada akhir tahun 90an, dan dengan melihat kesenjangan yang semakin melebar antara mereka yang kaya dan mereka yang tak punya, banyak kalangan intelektual yang menyatakan bahwa kita patut mempertanyakan kembali makna globalisasi. Saat ini kekayaan 359 orang terkaya di dunia setara dengan kekayaan 2,9 milyar orang-orang termiskin di dunia (*Swanvri dkk, 2011 p. 1*). Ini berarti hampir 80% kekayaan dunia saat ini dikuasai oleh hanya 20% penduduk dunia. Sumitomo Finance memiliki pendapatan senilai USD 167,53 milyar, sedangkan Indonesia hanya memiliki pendapatan sebesar USD 52,20 milyar (*Maulana, 2010 p. 45*). Di negara-negara berkembang pemeliharaan kesehatan dasar dan nutrisi memerlukan biaya USD 13 milyar, sementara USD 17 milyar dihabiskan untuk membeli

makanan hewan piaraan (kucing dan anjing) di Eropa dan Amerika Serikat (*Rais, 2008 p. 22*).

Beberapa pandangan pesimistis terhadap globalisasi melihat bahwa globalisasi sebagian besar merupakan urusan negara-negara industri utara, di mana masyarakat berkembang di selatan hanya berperan sedikit atau tidak sama sekali. Pandangan ini menganggap bahwa globalisasi telah menghancurkan budaya lokal, memperluas kesenjangan dunia, dan membuat kehidupan kaum miskin semakin buruk. Beberapa pihak berpendapat bahwa globalisasi menciptakan dunia yang terbelah antara pemenang dan pecundang, hanya sedikit yang dapat melaju dengan cepat mencapai kemakmuran, sementara mayoritas yang lain mengalami kehidupan yang penuh kesengsaraan dan keputusasaan (*Giddens, 2001 p. 10*).

Lebih keras lagi, kalangan yang menentang globalisasi menyatakan bahwa globalisasi tidak ubahnya sebagai imperialisme gaya baru, yang melalui proyek-proyek politik imperialis-kapitalis global, dengan pemerintahan globalnya, secara terang-terangan melakukan “rampokisasi” dengan dalih menegakkan “pazarisasi” negara-negara sedang berkembang. Aliran strukturalisme dan dependensia –terutama yang dikembangkan oleh pakar-pakar ekonomi Amerika Latin- termasuk dalam kelompok ini. Mereka menolak globalisasi sebab sistem ini dilandaskan pada insting *homo homeni lupus* yang predatoris. Untuk memperbaiki posisi negara-negara berkembang, mereka menganjurkan kebijakan-kebijakan yang lebih berfokus ke dalam (*inward looking*) dan menanamkan semangat nasionalisme. Mereka menolak

ketidaksetaraan global dan mempertahankan keunikan nasional. Mereka menolak dominasi atau subordinasi ekonomi, dan mengutamakan koeksistensi damai antar bangsa serta memperjuangkan “internasionalisme kesetaraan yang baru (*a new internationalism of equals*)” (Deliarnov, 2006 p. 202).

Selanjutnya untuk melihat bagaimana persoalan-persoalan mengenai ini muncul di negara-negara berkembang dan membawa keresahan yang terasa tak henti-henti hingga hari ini, ada baiknya mengkaitkan proses globalisasi tersebut dengan variabel-variabel lain yang relevan.

Seperti yang dikatakan kaum penentang globalisasi, penting untuk turut membahas negara-negara maju yang gencar mengusung isu globalisasi. dan terutama sekali disini adalah Amerika Serikat, karena selanjutnya akan terlihat bahwa akar dari semua permasalahan yang terkait dengan proses globalisasi saat ini memang bermula pada negara tersebut. Setelah di era 80an Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan beserta Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher menamatkan riwayat *welfare state* di negaranya, merekapun mengusung ideologi yang dikenal dengan nama Neoliberalisme untuk diterapkan dinegara mereka dan untuk kemudian dalam perkembangannya menjadi nilai-nilai utama di dalam proses globalisasi.

Neoliberalisme sendiri merupakan sebuah bentuk baru dari paham ekonomi pasar liberal, yang juga salah satu varian dari kapitalisme. Lompatan kualitatif yang dilakukan oleh kapitalisme tersebut mempunyai empat ciri khusus yaitu (Gills, 2000 p. 4):

1. Perlindungan atas kepentingan modal dan perluasan atas proses akumulasi modal pada tingkatan dunia.
2. Sebuah tendensi untuk homogenisasi kebijakan negara dan bentuk negara untuk memaksa negara secara instrumental melindungi modal dan proses atas akumulasi kapital melalui ideologi pasar
3. Formasi dan perluasan otoritas institusi transnasional diatas negara, yang bertujuan untuk mengartikulasikan kembali negara untuk memfasilitasi akumulasi modal global.
4. Eksklusi politik atas kekuatan sosial yang tidak sepakat dari arena pembuatan kebijakan negara, dalam rangka desosialisasi subyek tersebut dan menyekat bentuk negara neoliberal melwan masyarakat yang dipimpinnya sendiri, untuk kemudian memfasilitasi sosialisasi resiko demi kepentingan modal.

Menurut teori, negara neoliberal haruslah lebih mementingkan hak-hak individu, aturan hukum dan pranata-pranata pasar bebas serta perdagangan bebas. Hal-hal tersebut dianggap tersebut dianggap sebagai syarat mendasar bagi terciptanya kebebasan individu. Yang menjadi kerangka hukumnya ialah kerangka hukum yang berbasiskan kewajiban-kewajiban kontrak dimana kewajiban-kewajiban ini merupakan produk dari proses negosiasi diantara mereka yang diakui oleh hukum sebagai individu-individu di ruang pasar (*Harvey, 2009 pp. 107-108*).

Pada perkembangan muktahirnya ide-ide neoliberal tersebut tertuang pada rekomendasi para arsitek ekonomi yang bermukim di Washington. Para

ilmuwan yang terlibat dalam diskursus itu berasal dari lembaga-lembaga donor yaitu IMF (*International Monetary Fund*), Bank Dunia, dan juga turut serta Departemen Keuangan Amerika Serikat. Belakangan rekomendasi ini lebih dikenal dengan istilah *Washington Consensus*. Istilah yang pertama kali dicetuskan oleh John Williamson (1994) ini semula ditujukan untuk memperbaiki kondisi ekonomi Amerika Latin yang sedang diterpa badai krisis ekonomi. Setidaknya ada 10 poin rekomendasi kebijakan ekonomi yang menjadi isi dari *Washington Consensus* yaitu (Rais, 2008 p. 15) :

1. Perdagangan bebas.
2. Liberalisasi pasar modal.
3. Nilai tukar mengambang.
4. Angka bunga ditentukan pasar.
5. Deregulasi pasar.
6. Transfer aset dari sektor publik ke sektor swasta.
7. Fokus ketat dalam pengeluaran publik pada berbagai target pembangunan sosial.
8. Anggaran berimbang.
9. Reformasi pajak.
10. Perlindungan atas hak milik dan hak cipta.

Dalam perjalanannya, ide-ide neoliberal ini telah di praktekkan di Amerika Serikat dan Inggris, dan ide-ide ini terus menyebar keseluruh pelosok dunia. Penyebaran ide-ide ini tentu tidak lepas dari peranan lembaga-lembaga donor internasional, terutama sekali IMF. Setelah *Washington Consensus* digunakan

untuk menyembuhkan krisis moneter di negara-negara Amerika Latin pada akhir 1980an, kemudian *Washington Consensus* digunakan pula untuk menaggulangi krisis Asia pada akhir 1990an. IMF merupakan lembaga donor yang 45% sahamnya dikuasai oleh negara-negara G-7. Bahkan, Amerika Serikat yang sangat berambisi menjadi penguasa dunia, menguasai saham IMF sebesar 18%. Dengan latar belakang seperti itu, sebagai sebuah lembaga keuangan internasional yang dikuasai oleh negara-negara G7, Khususnya Amerika Serikat, IMF mustahil mengelak dari misi yang dititipkan oleh para pemodalnya.

Dugaan adanya indikasi imperialisme gaya baru dibalik proses globalisasi seperti yang disampaikan oleh para penentang globalisasi mungkin saja ada benarnya. Di dalam sebuah dokumen yang terbit pada 22 september 2002, dan prakatanya ditandatangani oleh George W. Bush, setebal 35 halaman yang berjudul “The National Security Strategy of The United States of America”, antara lain tercantum dua pernyataan berikut, “...*the United States will use this moment of opportunity to extend the benefits of freedom across the globe. We will actively work to bring the hope for democracy, development, free markets, and free trade to every corner of the world*”, “...*Trade and investment are the real engines of economic growth. Even government aid increase, most money for development must come from trade, domestic capital, and foreign investment. An effective strategy must try to expand the flows as well, free markets and free trade are key priorities of our national security strategy*” (Baswir, 2009 p. 39). Dari kedua kutipan itu dapat diketahui betapa Amerika

Serikat tidak hanya melihat *free markets* dan *free trade* sebagai bagian dari strategi ekonomi mereka. Amerika Serikat secara tegas meletakkan *free markets* dan *free trade* sebagai prioritas kunci strategi keamanan nasional mereka. Dalam rangka itu, Amerika Serikat secara tegas menyatakan, “akan bekerja keras untuk membawa *free markets* dan *free trade* ke seluruh penjuru dunia.”

Hadirnya kepentingan Amerika Serikat didalam proses globalisasi begitu tampak dalam wajah globalisasi. Sudah barang tentu, globalisasi tidak berkembang secara adil, dan tidak berarti semua konsekuensinya menguntungkan atau baik. buat kebanyakan orang yang tinggal di luar Eropa dan Amerika Utara, globalisasi terkesan tidak menyenangkan seperti Westernisasi atau mungkin Amerikanisasi karena Amerika Serikat kini menjadi satu-satunya negara adidaya dengan posisi yang dominan di bidang ekonomi, budaya dan militer dalam tatanan global. Banyak wujud kultural globalisasi yang paling kelihatan berwajah Amerika Serikat seperti Coca Cola, Mc Donald’s, CNN. Kebanyakan perusahaan multinasional raksasa berbasis di Amerika Serikat juga (*Giddens, 2001 p. 10*). Lalu pertanyaan selanjutnya yang coba mengulang pertanyaan sebelumnya di atas, apakah kita masih harus mengiyakan bahwa globalisasi telah membawa kebaikan bagi kehidupan umat manusia?

Perdebatan mengenai globalisasi tak jarang disampaikan dalam bentuk dikotomi yang tegas antara “baik” dan “buruk”. Persoalan sebenarnya jauh lebih kompleks. Penting untuk memilah bagi siapa globalisasi tersebut baik,

dan bagi siapa ia buruk. Begitu pula, bagaimana membuat globalisasi menjadi lebih ramah pada orang-orang yang telah merasakan konsekuensi yang terparah. Operasi proses globalisasi terjadi dalam, dan bersifat transnasional sampai lokal. Yang penting dikaji adalah sifat dasar institusi tersebut, operasinya, dan cara merestrukturasinya. Menerima keputusan pasar bebas bukanlah jawaban yang sesungguhnya. Pasar selalu berkaitan erat dengan dengan kerangka sosial yang lebih besar. Ia memerlukan mekanisme sosial untuk menegakkan kontrak, dan menentukan standar untuk menilai apa yang boleh dilakukan oleh para partisipannya. Ketika keputusan pasar berpihak pada segelintir minoritas dan mengenyahkan mayoritas yang lain, aturan-aturan tersebut patut digugat. Aturan seperti itu akan memiliki konsekuensi politik, yaitu bangkitnya kekuatan perlawanan untuk merubah aturan permainan. Inilah yang telah diajarkan sejarah. Dan hal ini akan terus terjadi (K. Tabb, 2003 p. 32).

Ada baiknya kita menyimak pendapat Anthony Giddens, seorang sosiolog paling berpengaruh saat ini. Didalam bukunya yang berjudul *Runaway World: How Globalisation is Reshaping Our Lives* yang terbit pada tahun 1999, Giddens menyatakan bahwa perkiraan filsuf abad pencerahan mengenai dunia yang stabil dan tertib setelah berkembangnya ilmu dan teknologi saat ini tidak begitu tampak atau tidak terasa sama sekali. Harapan novelis George Orwell yang sama dengan sosiolog Max Weber mengenai sebuah masyarakat yang begitu stabil dan dapat diprediksikan, dimana kita semua menjadi roda-roda kecil dalam mesin sosial dan ekonomi yang besar, tampaknya juga

meleset. Dunia tempat kita hidup saat ini bukannya semakin dapat dikendalikan, melainkan dunia kita tampaknya justru di luar kendali kita, sebuah dunia yang lepas kendali (*runaway world*). Selain itu, beberapa pengaruh yang dikira dapat membuat hidup kita lebih pasti dan dapat diprediksikan, termasuk kemajuan ilmu dan teknologi, seringkali mempunyai dampak yang sebaliknya. Perubahan Iklim Global dan berbagai risiko yang berkaitan dengannya, misalnya, mungkin merupakan akibat dari intervensi kita terhadap lingkungan. Ini bukanlah fenomena alamiah. Tak pelak lagi, ilmu dan teknologi terlibat dalam upaya kita menanggulangi risiko semacam itu, namun keduanya lebih dahulu menciptakan risiko tersebut (*Giddens, 2001 pp. xiv-xv*).

Dapat disimpulkan bahwa ternyata proses globalisasi yang ada saat ini masih menjadi sebuah perdebatan yang alot dan belum menemui sebuah titik temu yang mencerahkan, walaupun globalisasi telah menghantarkan manusia kedalam sebuah dunia yang sangat mengagumkan, namun masih ada risiko-risiko yang mesti ditanggung dan masih ada problematika-problematika yang harus diselesaikan.

Diantara perdebatan antara kubu pendukung globalisasi yang didalam istilah Spillane (2003) disebut sebagai kelompok *hyperglobalist*, dan kubu penolak globalisasi yang disebut kelompok skeptis. Hadir kelompok yang disebut dengan kelompok transformatif. Kelompok yang mengambil posisi tengah ini menganggap globalisasi pernah terjadi dimasa lalu. Tetapi mereka memandang globalisasi saat ini berbeda dengan perdagangan bebas dunia pada

masa-masa sebelumnya. Perbedaan antara globalisasi masa lalu dengan masa sekarang antara lain dapat dilihat dari kecepatan (*velocity*), intensitas (*intensity*), dan eksistensinya (*extensy*).

Dalam istilah Sri Edi Swasono kelompok ini tergolong kedalam kelompok yang lebih kritis dan objektif dalam memandang globalisasi. Mereka melihat kebaikan dan keburukan globalisasi secara objektif, dan secara kritis mengungkapkan globalisasi sebagai sebuah fenomena yang mengecewakan. Mereka melihat globalisasi penuh dengan janji-janji, tetapi isinya kosong. Kelompok ini berpendapat bahwa globalisasi memiliki potensi yang amat besar, namun mereka juga sangsi apakah janji-janji globalisasi tersebut akan terwujud. Pendeknya, kelompok ini berusaha memperbaiki dan mengkritisi bukan menentang (*Deliarnov, 2006 pp. 201-202*).

Joseph E. Stiglitz, yang akan menjadi fokus pada skripsi ini berdiri dalam kelompok transformatif tersebut. Dia melihat bahwa penerapan resep-resep *Washington Consensus* yang terjadi di era globalisasi, justru membawa negara terutama negara-negara berkembang kedalam jurang kemiskinan yang parah. Mengenai proses globalisasi lebih lanjut, Stiglitz beranggapan bahwa hal tersebut dapat membantu negara, katakanlah dalam hal peningkatan Produk Domestik Bruto(PDB), yaitu jumlah Produksi barang dan jasa. Namun Hal ini bukan berarti dapat meningkatkan taraf hidup seluruh masyarakatnya. Justru timbul kekhawatiran bahwa Globalisasi akan menciptakan negara-negara kaya dengan masyarakat miskin di dalamnya (*Stiglitz, 2007 p. 55*).

Stiglitz merupakan pemenang hadiah Nobel pada tahun 2001 dan seorang staf pengajar pada Columbia University. Pada tahun 1993 dia meninggalkan dunia kampus karena ditugaskan sebagai salah satu anggota Dewan Penasehat Ekonomi untuk Presiden Bill Clinton. Setelah bertahun-tahun menekuni bidang penelitian dan pengajaran, ini merupakan lompatan besar baginya yaitu memasuki dunia pembuatan kebijakan, atau lebih spesifik lagi yaitu politik. Dari posisi tersebut dia dipindah ke Bank Dunia pada tahun 1997, di sana dia bertugas sebagai ekonom senior dan wakil presiden senior selama hampir tiga tahun, yang berakhir pada Januari 2000. Menurutnya, tidak ada waktu yang lebih menarik lagi dibanding ketika masuk ke dunia pembuatan kebijakan. Dia masih bertugas di Gedung Putih ketika Rusia memulai peralihannya dari komunisme, dia juga bekerja di Bank Dunia selama krisis keuangan yang dimulai di Asia Timur pada Tahun 1997. Dulu, dia selalu tertarik dengan pembangunan ekonomi dan apa yang disaksikannya secara radikal mengubah pandangannya terhadap globalisasi dan pembangunan (Stiglitz, 2003 p. ix).

Pada tahun 2000, Stiglitz menulis sebuah buku tipis yang di Indonesia di beri judul *Washington Konsensus: Arah Menuju Jurang Kemiskinan*. Di dalam buku ini, Stiglitz Menjelaskan mengenai kesalahan-kesalahan penerapan resep *Washington Consensus* di negara-negara berkembang, yang justru membawa negara-negara berkembang pada kesengsaraan. Selanjutnya di tahun 2002, Stiglitz mempertajam apa yang ditulisnya pada buku pertama dengan menerbitkan buku *Globalization and Its Discontent*. Buku ini mendapat respon

yang begitu luas dari seluruh dunia karena mengkritik secara tajam Kebijakan *Washington Consensus* beserta lembaga-lembaga donor yang terkait di dalamnya. Stiglitz mengatakan bahwa dia meyakini globalisasi yaitu penghapusan hambatan-hambatan terhadap perdagangan bebas dan integrasi ekonomi yang semakin kuat dapat menjadi suatu kekuatan yang kekal dan berpotensi untuk memakmurkan setiap orang di dunia, khususnya orang-orang miskin. Tetapi dia juga percaya bahwa jika memang demikian keadaannya, pengelolaan globalisasi selama ini, termasuk berbagai perjanjian perdagangan internasional yang telah memainkan peranan besar dalam menghapuskan hambatan-hambatan tersebut dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada negara-negara berkembang dalam proses globalisasi, perlu dipertimbangkan kembali secara radikal (*Stiglitz, 2003 pp. ix-x*).

Stiglitz melanjutkan bahwa pentingnya memandang permasalahan secara adil dengan mengesampingkan ideologi serta melihat pada bukti-bukti sebelum membuat keputusan mengenai tindakan apa yang terbaik. Sayangnya, meskipun tidak mengherankan, ketika dia berada di Gedung Putih dan Bank Dunia, dia melihat banyak keputusan dibuat seringkali karena pertimbangan ideologi dan politik. Akibatnya banyak tindakan salah arah yang dilakukan, tindakan yang tidak memecahkan masalah yang ada, tetapi yang sesuai dengan kepentingan atau keyakinan dari orang-orang yang berkuasa. Dengan mengutip Pierre Bourdieu, Stiglitz mengatakan mengenai perlunya para politisi berperilaku layaknya akademisi serta terlibat dalam perdebatan ilmiah yang berdasarkan pada fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat. Sayangnya, hal

sebaliknya yang justru amat sering terjadi. Ketika para akademisi terlibat dalam pembuatan kebijakan, rekomendasi-rekomendasinya menjadi bernilai politis dan mulai membengkokkan bukti agar sesuai dengan kehendak mereka yang berkuasa (*Stiglitz, 2003 p. x*).

Di tahun 2003 Stiglitz melanjutkan koreksinya terhadap Globalisasi dengan menerbitkan buku berjudul *The Roaring Nineties: A New History of The World's Most Prosperous Decade*. Buku ini berupaya menggambarkan masa depan berdasarkan pengalaman masa lalu, dengan kembali melihat pada sejarah perekonomian Era 90an. Dimanakah posisi Amerika Serikat dan negara maju lainnya dan ke arah manakah mereka menuju. Banyak institusi-institusi utama dalam masyarakat kita anjlok kredibilitasnya, dan dalam beberapa kasus tidak dapat dipulihkan lagi, mulai dari Gereja, CEO, sistem peradilan, profesi akuntan, sampai perbankan. Dalam buku ini dia hanya meninjau institusi perekonomian, kendati tak pelak lagi dia beranggapan bahwa apa yang berlangsung dalam institusi perekonomian mencerminkan, dan punya konsekuensi penting pada apa yang terjadi diluarnya (*Stiglitz, 2006 p. xxiv*).

Buku *Making Globalization Work* mungkin menjadi karya Stiglitz yang dipenuhi dengan saran-saran praktis untuk memperbaiki globalisasi. Buku yang terbit pada tahun 2006 tersebut mencoba melihat persoalan globalisasi secara lebih meluas berikut strategi-strategi praktis yang dapat diacu bagi seluruh pengambil kebijakan di seluruh dunia. Lebih lanjut Stiglitz menuliskan keyakinannya akan proses demokrasi, keyakinnya bahwa warga negara yang

memiliki informasi yang lebih baik mungkin untuk memberikan perhatian terhadap penyalahgunaan perusahaan dan kepentingan keuangan tertentu yang menguasai proses globalisasi, bahwa masyarakat umum di negara industri maju dan negara-negara berkembang memiliki kepentingan yang sama dalam mewujudkan globalisasi (*Stiglitz, 2007 pp. 34-35*).

Pada tahun 2009, Stiglitz kembali menulis buku dengan judul *Perang Tiga Triliun Dollar: Bencana Ekonomi dibalik Invasi Amerika Serikat Ke Iraq*. di dalam buku ini Stiglitz menjelaskan mengenai kritiknya terhadap keanehan kebijakan invasi militer Amerika Serikat. Biaya perang yang memakan hampir tiga triliyun dollar tersebut seandainya saja digunakan untuk menciptakan perdamaian, tentulah akan lebih berarti dan dapat mensejahterakan kehidupan di dunia, daripada digunakan sia-sia untuk membunuh manusia lain. Buku ini semakin menegaskan standar ganda yang dipakai oleh Amerika Serikat dalam menegakkan demokrasi di dunia.

Pada tahun 2009 juga, Stiglitz menerbitkan laporan kerja *Commission on the Measurement of Economics Performance*, bersama Amartya Sen dan Jean Paul Fitoussi, laporan itu berisikan penelitian yang dilakukan atas permintaan presiden Perancis, Nicolas Sarkozy, mengenai efektifitas penghitungan kesejahteraan melalui tolak ukur Produk Domestik Bruto (PDB).

Apabila kita coba mencari genealogi dari pemikiran Stiglitz, maka dapat dilihat bahwa Stiglitz sedikit banyak dipengaruhi oleh pemikiran John Maynard Keynes, seorang ekonom yang pada masa *Bretton Woods* berhasil menggolkan wacana mengenai *Welfare State* untuk memperbaiki kondisi

perekonomian dunia yang ketika itu dilanda depresi besar. konsep ini digunakan diseluruh dunia dalam kurun waktu yang cukup lama. Ciri khas dari konsep ini adalah adanya peran pemerintah dalam percaturan ekonomi pasar. Dan ini hampir mirip dengan wacana Stiglitz, sehingga ada yang menjulukinya sebagai ekonom Neo Keynesian.

Pandangan-pandangan Stiglitz tentulah sangat relevan untuk menganalisa fenomena-fenomena globalisasi yang terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Di Indonesia, awal mula dipraktikkannya ide-ide *Washington Consensus* secara radikal adalah ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi di tahun 1998. Pada masa itu Indonesia akhirnya tidak dapat menghindarkan diri untuk tidak meminta bantuan dari IMF dalam menyelesaikan krisis. Akhirnya Indonesia mendapatkan pinjaman berupa dana segar sekaligus paket kebijakan penyembuhan ekonomi dari IMF. Peran IMF ini dirangkum dalam sebuah program yang dikenal dengan nama *letter of intent* (LoI). Dan walaupun kontrak dengan IMF sebenarnya telah berakhir pada tahun 2003, namun IMF belum akan benar-benar lepas dari Indonesia karena pemerintah waktu itu memilih opsi *Post Program Monitoring* (PPM) hingga akhir tahun 2007. Dan ini tentu mengindikasikan bahwa pemerintahan yang berkuasa di Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru tetap akan memiliki keterkaitan dengan proyek penyebaran ide-ide neoliberalisme.

Pada masa pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri misalnya, salah satu kebijakan yang paling disorot terkait dengan proyek penyebaran ide-ide neoliberalisme adalah masalah privatisasi Indosat. Kebijakan ini aneh

karena Indosat pada saat itu tergolong kedalam perusahaan negara yang sehat. Pada akhir tahun 2002 pemerintah menjual saham pemerintah hingga 41,49% kepada Singapore Telemedia Pte. Ltd (STT). Ini merupakan kali ketiga pemerintah menjual saham indosat, dan ini merupakan penjualan terbesar. Sebelumnya 25% saham pemerintah telah dijual pada tahun 1994, dan 11,32% pada Mei 2002. Program privatisasi ini tentu tidak lepas dari peran yang dimainkan oleh IMF. Di dalam LoI pertama yang ditandatangani Oktober 1997 dinyatakan bahwa privatisasi disebut sebagai strategi untuk meningkatkan kompetisi pada level domestik, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki *supply* kepada konsumen. Dalam LoI tersebut juga dicantumkan bahwa pembahasan program privatisasi harus dilakukan dengan kerjasama Bank Dunia. Hal ini berlanjut pada penandatanganan LoI kedua pada tahun 1998, dimana pemerintah ditargetkan melakukan privatisasi terhadap 164 BUMN. Disebutkan pula bahwa pemerintah juga mulai mencari investor strategis yang berminat pada BUMN di bidang telekomunikasi internasional, jasa pelabuhan dan lapangan terbang, serta perkebunan kelapa sawit (*Syamsul Hadi dkk, 2006 pp. 98-101*).

Persoalan privatisasi ini ternyata berbuntut panjang, protes datang dari Serikat Pekerja Indosat (SPI) sendiri, mereka menolak dan sangat menyayangkan pelaksanaan privatisasi indosat karena telah mengakibatkan negara rugi hingga triliunan rupiah. Menurut mereka, permasalahan hadir karena harga saham yang dipatok terlalu rendah, selain itu SPI juga melihat nilai strategis bisnis telekomunikasi di Indonesia, oleh karena itu akan sangat

berbahaya bagi bangsa dan negara bila dikuasai oleh negara asing atau oleh salah satu perusahaan induk pertelekomunikasian tertentu, apalagi perseroan Indonesia Communication Ltd yang dipakai alat oleh STT dalam transisi akuisisi nanti ternyata berdomisili di Mauritius, tempat yang terkenal sebagai “surga” pencucian uang dan penggelapan pajak (*Syamsul Hadi dkk, 2006 p. 104*).

Ketika terjadi transisi pemerintahan di tahun 2004, dimana Susilo Bambang Yudhoyono terpilih sebagai Presiden Indonesia selanjutnya (kembali terpilih pada 2009), kebijakan ekonomi Indonesia masih berkiblat pada ide-ide neoliberalisme, hal ini dapat kita buktikan dengan menganalisa kebijakannya yang benar-benar berjalan searah dengan Resep *Washington Consensus*. Seperti kebijakan Privatisasi BUMN yang paling terbaru dan masih hangat dibicarakan yaitu penerbitan lembar saham PT. Krakatau Steel di Bursa Efek Indonesia, padahal perusahaan negara tersebut juga tergolong *profit*. Lalu juga dapat terlihat dari tetap dilanjutkannya kesepakatan perdagangan bebas ACFTA (ASEAN-China Free Trade Area) yang dimulai pada tahun 2010.

Dampak ACFTA mulai terasa pada kegiatan ekonomi domestik. Kekhawatiran tentang dampak ACFTA ini bukanlah hal yang mengada-ada. Tahun 2008 impor produk China mengambil alih 70% pangsa pasar domestik yang semula dikuasai oleh sektor UMKM. Banjir produk murah dari China menyebabkan pangsa pasar usaha tekstil dan produk terkait (TPT) domestik menurun dari 57% di tahun 2005 menjadi 23% di tahun 2008. Di bidang

ekspor, produk non migas Indonesia seperti tekstil dan mainan anak-anak juga makin disaingi oleh produk-produk sejenis dari China (*Hadi, 2010 p. 72*).

Selain itu, Kebijakan-kebijakan ekonomi neoliberal juga telah membuat Indonesia mengalami kerusakan lingkungan yang akut, seperti yang terjadi di Papua, Nusa Tenggara, dan Kalimantan. Ini semua merupakan ulah dari tangan-tangan korporasi multinasional seperti *Freeport MacMoran, Newmont*, yang beroperasi sekaligus mengeksploitasi sumber daya alam yang ada di Indonesia. Begitu pula dampak buruk yang disebabkan dengan kebijakan pengeluaran publik yang sangat ketat, dimana pemerintah hanya peduli pada persoalan makro seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi dan seolah mengabaikan sektor mikro seperti pengurangan pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja atau pemberian subsidi bagi rakyat miskin.

Mengenai permasalahan-permasalahan yang terkait dengan globalisasi di negara-negara berkembang seperti di Indonesia, menurut Stiglitz Tak dapat di pungkiri lagi adanya, mereka yang dianggap “terbuang” dalam percaturan ekonomi global secara umum tidak berkeberatan terhadap akses yang lebih luas menuju pasar global atau terhadap penyebaran pengetahuan yang luas, yang memungkinkan negara-negara berkembang mengambil keuntungan atas penemuan-penemuan dan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh negara maju. Tetapi, mereka mengemukakan lima masalah yang harus menjadi perhatian, yaitu (*Stiglitz, 2007 p. 56*):

1. Aturan main globalisasi tidak adil, dirancang secara khusus untuk menguntungkan negara industri maju. Kenyataannya, dewasa ini beberapa

perubahan sangat tidak adil sehingga membuat negara-negara miskin menjadi makin terpuruk.

2. Globalisasi mendahulukan nilai-nilai kebendaan di atas nilai-nilai lain, Seperti lingkungan dan kehidupan itu sendiri.
3. Cara pengelolaan globalisasi telah mencabut sebagian besar kedaulatan negara-negara berkembang, termasuk kemampuan membuat keputusan-keputusan di bidang-bidang penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Hal ini tentu saja memperlemah demokrasi.
4. Sementara para pendukung globalisasi mengklaim bahwa setiap orang akan mendapat keuntungan secara ekonomi, terdapat banyak bukti yang menunjukkan bahwa banyak pihak yang dirugikan, baik di negara maju maupun berkembang.
5. Barangkali yang terpenting, sistem ekonomi yang dipaksakan(pada negara-negara berkembang), bahkan untuk beberapa kasus terlalu dipaksakan, kurang tepat dan sering kali sangat merusak. Globalisasi seharusnya bukan merupakan Amerikanisasi dalam hal kebijakan ekonomi maupun budaya, tetapi memang hal itulah yang sering terjadi. Kondisi demikianlah yang pada akhirnya menimbulkan kemarahan.

Relevansi pemikiran stiglitz terhadap kondisi perekonomian Indonesia saat inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai persoalan ini dan penulis tuangkan dalam proposal skripsi ini.

C. Pokok Permasalahan

Dari latar belakang masalah tersebut maka penulis menarik pokok permasalahan yaitu :

1. Mengapa proses globalisasi sejauh ini belum dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh negara-negara di dunia menurut Joseph E. Stiglitz?
2. Bagaimana cara mereformulasikan kebijakan ekonomi Indonesia pasca berakhirnya rezim orde baru dalam konteks globalisasi menurut Joseph E. Stiglitz?

D. Kerangka Pemikiran

Di dalam skripsi ini penulis menggunakan Teori Asimetri Informasi dan perspektif Transformasionalis. Hal ini menurut penulis sangat relevan untuk digunakan sebagai alat analisa dalam melihat kebijakan ekonomi Indonesia di era pasca orde baru dalam konteks globalisasi.

Teori Asimetri Informasi

Teori Asimetri Informasi sangat tepat untuk digunakan sebagai alat analisa persoalan-persoalan yang terkait dengan proses globalisasi, terutama untuk melihat kelemahan-kelemahannya. fokus riset Stiglitz selama bertahun-tahun ini tertuju pada bagaimana informasi mempengaruhi keputusan-keputusan ekonomi dan politik. Asimetri informasi adalah sebuah keadaan dimana beberapa orang tahu tentang sesuatu yang tidak diketahui oleh orang lain (dan ini selalu terjadi) (Stiglitz, 2007 p. 35). Dalam tulisan ini, variabel utama yang

akan menjadi tolak ukur dalam melihat ketimpangan informasi adalah seberapa banyaknya informasi yang dimiliki oleh negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Dan yang dimaksud dengan informasi dalam tulisan ini adalah ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber-sumber utama informasi yang ada di ruang publik.

Bila melihat dari kacamata ilmu ekonomi mikro, secara sederhana contoh perbedaan informasi ini terjadi antara pekerja dan majikannya, pemberi pinjaman dengan peminjam, perusahaan asuransi dengan orang yang diasuransikan. Lebih jauh lagi mengenai contohnya adalah kenapa ada pengangguran, kenapa mereka yang lebih memerlukan kredit seringkali tidak bisa mendapatkannya –dengan meminjam jargon para ekonom yaitu *credit rationing* (pembatasan kredit). Model-model baku yang telah digunakan para ekonom selama beberapa generasi menyatakan bahwa pasar tersebut telah bekerja secara sempurna—sejumlah ekonom bahkan menyangkal adanya pengangguran sebenarnya- mereka berpendapat, satu-satunya alasan tentang adanya pengangguran adalah bahwa upah terlalu tinggi, lalu pemecahannya jelas, yaitu menurunkan upah (*Stiglitz, 2003 pp. xii-xiii*).

Ekonomi informasi, dengan analisisnya yang lebih baik mengenai tenaga kerja, modal, dan pasar produk, membantu pembuatan model-model makro ekonomi yang memberikan pemahaman yang lebih dalam terhadap masalah pengangguran, model-model yang menjelaskan masalah fluktuasi, resesi dan depresi, yang merupakan persoalan kapitalisme sejak mula. Teori-teori tersebut memiliki implikasi kebijakan yang kuat –beberapa diantaranya sangat

jelas bagi hampir semua orang yang bersentuhan dengan realitas- misalnya, jika menaikkan tingkat suku bunga hingga tingkat yang berlebihan maka, perusahaan-perusahaan yang memiliki hutang sangat besar dapat dipaksa menjadi pailit, dan ini akan berdampak buruk bagi ekonomi (*Stiglitz, 2003 p. xiii*).

Sistem-sistem statistik dan akunting menyediakan bagian penting dari kerangka pikir yang dipakai untuk melihat dan menganalisa dunia. Merekalah bagian kritis sistem informasi. Satuan-satuan ukur yang tidak sejalan dengan persepsi individual menjadi sangat problematis. Bila PDB naik, tapi sebagian besar orang merasa hidup makin susah, mereka bisa beranggapan pemerintah memanipulasi statistik, dengan harapan bahwa dengan memberitahu rakyat bahwa keadaan membaik, mereka akan merasa membaik. Dalam kasus-kasus semacam ini runtuhlah kepercayaan terhadap pemerintah, dan dengan runtuhnya kepercayaan ini, melemahlah kemampuan pemerintah menangani isu-isu yang memiliki kepentingan publik yang vital (*Joseph E. Stiglitz, 2011 pp. xiii-xiv*).

Lebih lanjut mengenai hal ini, Stiglitz mengatakan bahwa *Washington Consensus* dalam kata lain menganjurkan dunia untuk menggunakan model Adam Smith, yaitu kemampuan “tangan tak terlihat”. dalam upaya melaksanakan kebijakan-kebijakan *Washington Consensus*, telah menunjukkan bahwa ketika informasi tidak lengkap dan pasar tidak sempurna, yang memang demikian adanya, khususnya di negara-negara berkembang, maka tangan yang tak terlihat bekerja dengan sangat tidak sempurna. Secara

signifikan diperlukan intervensi pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk dapat meningkatkan efisiensi pasar. Batasan-batasan terhadap kondisi-kondisi yang membuat pasar menjadi efisien merupakan hal yang penting, banyak kegiatan utama pemerintah dapat dipahami sebagai respon terhadap kegagalan pasar yang muncul. Apabila informasinya sempurna, peran pasar keuangan akan berkurang dan regulasi pasar keuangan menjadi berkurang. Jika persaingan otomatis sempurna, tidak diperlukan peran otoritas untuk mencegah peleburan badan usaha (*antitrust authorities*).

Tetapi teori kebijakan *Washington Consensus* didasarkan pada model-model ekonomi yang terlalu sederhana, yaitu model keseimbangan persaingan (*competitive equilibrium model*), dimana tangan tak terlihat bekerja dengan sempurna. Karena dalam model ini campur tangan pemerintah tidak diperlukan -apabila pasar yang liberal, bebas tanpa hambatan, berjalan secara sempurna- maka *Washington Consensus* kadang disebut juga sebagai neoliberal karena berdasarkan fundamentalisme pasar, yang merupakan kebangkitan dari kebijakan *Laizzes Faire* yang populer di beberapa kalangan pada abad kesembilan belas (*Stiglitz, 2003 pp. 103-104*).

Bahkan meski teori Smith tersebut relevan bagi negara-negara industri maju, persyaratan-persyaratan yang diperlukan tidak bisa dipenuhi oleh negara-negara berkembang. sistem pasar tersebut jelas-jelas mensyaratkan agar adanya persaingan dan informasi yang sempurna. Tetapi persaingan yang terjadi terbatas adanya dan informasi yang ada ternyata jauh dari sempurna (*Stiglitz, 2003 p. 104*).

Diantara berbagai “kegagalan pasar”, yang menarik perhatian Stiglitz untuk diteliti adalah yang terkait dengan masalah agensi (pelaku), yakni ketika seseorang harus bertindak mewakili kepentingan orang lain. Ketidaktepatan informasi seringkali membuat sulitnya memastikan bahwa si agen mengerjakan apa yang seharusnya ia kerjakan. Selain itu, kegagalan menyelaraskan insentif membuat agen sering tidak mengerjakan apa yang harus dikerjakan. Situasinya menjadi sangat problematik saat terjadi konflik kepentingan, sebagaimana tampak menonjol pada berbagai skandal korporasi yang terjadi beberapa tahun belakangan (*Stiglitz, 2006 p. 15*).

Penjelasan mengenai teori asimetri informasi sebenarnya sangatlah mengarah pada kajian yang ditujukan untuk memecahkan persoalan-persoalan ekonomi mikro, yang tentu bukanlah menjadi fokus utama dalam tulisan ini. Namun hal ini bukan berarti studi ini tidak relevan dalam memandang persoalan-persoalan hubungan internasional. Sebagai landasan pijak, ternyata teori asimetri informasi juga mampu menjadi pilihan alat bedah dalam mengoreksi realitas hubungan internasional, terutama untuk melihat berbagai fenomena yang ada di dalam era globalisasi.

Di dalam globalisasi, yang dimaksud dengan informasi sangat beragam. Salah satu yang dimaksud dengan informasi dan yang akan menjadi objek analisa dalam penelitian ini adalah mengenai ketimpangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang disebabkan oleh diratifikasinya undang-undang perdagangan Hak Kekayaan Intelektual. Selain itu akan di bahas pula mengenai asimetri dalam penguasaan sumber-sumber informasi serta sedikit

mengenai ketimpangan informasi yang dimiliki oleh agen-agen atau pelaku globalisasi.

Perspektif Transformasionalis

Di dalam buku *Global Transformation*, David Held juga membagi sudut pandang intelektual globalisasi ke dalam tiga kelompok, yaitu kelompok hiperglobalis yang sangat mendukung globalisasi dengan hukum pasar bersaing sepenuhnya, kaum skeptis yang menolak globalisasi, dan terakhir kaum transformasionalis yang tetapi mengamini globalisasi tapi dengan syarat-syarat tertentu. Menurut kaum transformasionalis yang akan jauh dibahas disini, globalisasi merupakan suatu fenomena sosial yang menyebabkan perubahan-perubahan kualitatif dalam kehidupan manusia. Pendekatan ini sependapat dengan pendekatan hiperglobalis yang menyatakan bahwa fenomena globalisasi seperti saat ini memang tidak pernah terjadi sebelumnya, tetapi pada saat yang sama kontradiktif dengan ide hiperglobalis mengenai kekuatan negara. Transformasionalis berargumen bahwa globalisasi yang berlangsung saat ini menempatkan kembali kekuasaan dan fungsi pemerintahan nasional. Hanya saja, negara tidak lagi bersembunyi di balik klaim kedaulatan nasional. Kekuasaan negara dalam mengambil keputusan disejajarkan dengan hukum internasional dan lembaga-lembaga *governance* global (Winarno, 2010 pp. 32-34).

Sejalan dengan itu, Stiglitz berpendapat bahwa globalisasi adalah tempat berlangsungnya konflik-konflik yang terjadi di dalam masyarakat. Peran pemerintah sangat penting dalam menangani konflik-konflik tersebut. Namun,

pihak yang konservatif kebanyakan terlalu tertarik pada “tangan tak terlihat Adam Smith”-yaitu dugaan bahwa pasar dan pemuasan kepentingan pribadi akan diarahkan oleh “tangan tak terlihat” untuk menuju efisiensi ekonomi-. Sekalipun mereka mengakui bahwa pasar tidak dapat dengan sendirinya melahirkan distribusi pendapatan yang dapat diterima secara sosial, mereka berpendapat bahwa isu-isu efisiensi dan kesetaraan harus dipisahkan. Dalam pandangan konservatif ini, ekonomi merupakan persoalan efisiensi, dan isu-isu mengenai kesetaraan seharusnya diserahkan kepada politik. Menurut Stiglitz, saat ini pertahanan intelektual dari fundamentalisme pasar sudah runtuh. Penelitiannya mengenai asimetri informasi menunjukkan bahwa ketidaksempurnaan informasi menyebabkan “tangan tak terlihat” jadi tampak tak terlihat, karena memang tangan tersebut tidak ada. Tanpa intervensi dan peraturan pemerintah yang sesuai, pasar tak akan mengarah pada efisiensi ekonomi (Stiglitz, 2007 p. 35).

Lebih lanjut menurut Stiglitz, sekarang tumbuh pula kesadaran bahwa bentuk kapitalisme tidak hanya satu, dan ekonomi dijalankan bukan hanya dengan satu cara yang “benar”. Ada bentuk-bentuk ekonomi pasar yang lain - seperti Swedia yang melakukan pertumbuhan sempurna yang membuat seluruh individu dalam kelompok masyarakat yang sangat beragam memperoleh pelayanan kesehatan dan pendidikan yang lebih baik serta penurunan ketidaksetaraan. Meskipun versi Swedia tidak dapat diterapkan di negara lain, atau tidak sesuai dengan negara berkembang tertentu, keberhasilannya menunjukkan bahwa ada bentuk alternatif-alternatif dari ekonomi pasar yang

paling efektif. Salah satu kritiknya terhadap lembaga-lembaga keuangan internasional adalah mereka berpura-pura bahwa *trade off* tidak pernah terjadi- satu rangkaian kebijakan membuat setiap orang menjadi lebih baik- sedangkan esensi dari ekonomi adalah adanya pilihan diantara banyak alternatif, beberapa diantaranya mungkin bermanfaat bagi kelompok-kelompok tertentu (seperti kapitalis asing) dengan membebankan biaya pada pihak/kelompok lain, beberapa mungkin mengakibatkan risiko terhadap yang lain (seperti pekerja) dengan keuntungan di tangan kelompok lain (*Stiglitz, 2007 p. 36*)

Dilanjutkan lagi, pilihan-pilihan dalam menghadapi masyarakat merupakan peran pemerintah. Kesuksesan ekonomi memerlukan penyesuaian antara pemerintah dan pasar. Pelayanan apa yang harus diberikan oleh pemerintah? Apakah seharusnya diadakan program pensiun untuk masyarakat? Apakah pemerintah semestinya mendorong sektor-sektor tertentu dengan insentif? Peraturan apa yang seharusnya digunakan untuk melindungi pekerja, konsumen, dan lingkungan? Keseimbangan ini jelas akan mengalami perubahan sejalan dengan waktu, dan akan berbeda dari satu negara ke negara lain. dan menurutnya, sulit untuk memperoleh keseimbangan yang diperlukan dalam globalisasi yang telah dijalankan sekarang ini. Stiglitz juga mengatakan bahwa pendapat para kritikus memang benar ketika mengatakan bahwa ada yang memaksakan nilai-nilai tertentu, yang seharusnya tidak dilakukan. Globalisasi tidak perlu membuat kerusakan lingkungan, meningkatkan ketidaksetaraan, memperlemah keragaman budaya, dan mendahulukan kepentingan korporasi dengan mengorbankan kesejahteraan warga masyarakat.

Stiglitz mencontohkan Asia Timur yang berhasil mengelola globalisasi dengan benar dan memberikan manfaat yang sangat besar bagi negara-negara berkembang maupun negara maju didunia ini (*Stiglitz, 2007 pp. 36-37*).

Negara-negara Asia timur yang disebutkan Stiglitz tersebut percaya akan pentingnya pasar, tetapi mereka menyadari bahwa pasar harus diciptakan dan dikelola. Mereka juga menyadari bahwa terkadang pihak swasta tidak melakukan hal-hal yang semestinya dilakukan. Misalnya apabila bank-bank swasta tidak membuka cabang-cabangnya hingga ke daerah pedesaan untuk mengumpulkan dana, pemerintahlah yang harus mengisi kekosongan tersebut. Apabila bank-bank swasta tidak menyediakan kredit jangka panjang, pemerintahlah yang harus menyediakan. Jika perusahaan-perusahaan swasta tidak menyediakan bahan dasar produksi seperti baja dan plastik, pemerintahlah yang harus membuatnya jika dapat dilakukan dengan efisien. Hampir seluruh wilayah melakukan liberalisasi-membuka pasar dan melakukan deregulasi-secara perlahan dalam jarak konsisten dengan kapasitas ekonomi. Ketika pemerintahan negara-negara Asia fokus pada pertumbuhan ekspor, terutama pada tahap awal pembangunan, mereka membatasi impor yang dapat mengurangi kegiatan industri dan pertanian lokal.

Beberapa negara, yaitu Cina, Malaysia, dan Singapura, mengajak investor asing untuk menanamkan modal. Sementara yang lain, seperti Korea Selatan dan Jepang, merasa lebih baik melakukan pembangunan tanpa bantuan modal asing, dan juga mengalami pertumbuhan. Negara yang mengundang investasi asing memastikan bahwa perusahaan-perusahaan asing melakukan transfer

teknologi pelatihan untuk pekerja-pekerja lokal, sehingga mereka ikut berkontribusi terhadap upaya pembangunan negaranya. Perdebatan mengenai liberalisasi pasar modal menjadi lebih tendensius. Bahkan setelah dua negara raksasa Asia, yaitu India dan Cina membuka pasar mereka untuk investasi jangka panjang, mereka tetap tertutup bagi aliran modal jangka pendek.

E. Hipotesa

Dalam konteks dunia yang terglobalisasi, kebijakan ekonomi Indonesia pasca runtuhnya rezim orde baru dituntut untuk keluar dari nilai-nilai fundamentalisme pasar yang hadir dalam ide neoliberalisme. Menurut Stiglitz, untuk dapat merasakan dampak positif dari globalisasi, maka negara-negara berkembang seperti Indonesia harus segera mengganti *Washington Consensus* yang selama ini menjadi patokan arah kebijakan ekonomi negara. Pasar bebas dengan persaingan sempurna tak akan pernah berjalan dengan baik karena terdapat ketidakseimbangan dalam penerimaan informasi, ketidak seimbangan informasi itu dapat diukur melalui ketidakseimbangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi diantara negara maju dan negara berkembang, ketidakseimbangan juga terjadi akibat adanya kekuatan lebih dari negara-negara maju dan perusahaan multinasional dalam penguasaan sumber-sumber informasi masyarakat luas atau ruang publik. Karena itu peranan pemerintah terutama dalam sektor-sektor yang tidak mampu di selesaikan dengan baik oleh mekanisme pasar sangatlah dibutuhkan.

F. Jangkauan Penelitian

Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum, akan dibatasi permasalahan dalam skripsi ini adalah mengenai kelemahan model-model globalisasi saat ini seperti perdagangan Hak Kekayaan Intelektual dan monopoli kepemilikan sumber-sumber Informasi. Setelah itu akan dibahas seputar kebijakan Ekonomi Indonesia paska orde baru. yaitu kebijakan-kebijakan seperti Privatisasi BUMN, pengesahan Undang-Undang Penanaman Modal Asing(PMA), serta tetap diteruskannya perjanjian *Asean-China Free Trade Area* (ACFTA).

Tidak menutup kemungkinan bahwa penelitian ini juga akan merambah ranah dan jangkauan waktu lain. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa kegagalan dan carut marut kondisi ekonomi politik di Indonesia pada waktu sekarang tidak serta merta karena faktor yang hadir pada masa pasca runtuhnya orde baru. Sedikit banyak ada faktor sebab dari waktu yang lalu, mengingat ide-ide neoliberalisme telah hadir di Indonesia sejak masa orde baru.

G. Metode Pengumpulan Data

Penulis berupaya mengembangkan tulisan yang bercorak deskriptif analitis; yaitu memberikan gambaran mengenai kekurangan-kekurangan serta kelemahan-kelemahan yang terdapat pada kebijakan ekonomi Indonesia. Penulis akan coba menggambarkan mengenai bagaimana ide-ide

neoliberalisme telah terbukti gagal dalam membangun perekonomian dunia, disini akan digunakan teori asimetri informasi. Selanjutnya penulis juga akan menjelaskan tentang korelasi ide-ide neoliberalisme tersebut dengan konteks Indonesia, dan diakhiri dengan solusi bagi Indonesia tentang bagaimana sebaiknya kebijakan ekonomi Indonesia berpijak. Dalam hal ini penulis akan dibantu dengan merunut pada pemikiran-pemikiran Joseph E. Stiglitz

Dalam penulisan skripsi ini penulis menghimpun data lewat studi kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan ini merupakan teknik pengumpulan data lewat bacaan (*general reading*) dengan mengumpulkan materi tulisan lewat referensi, buku-buku, artikel-artikel yang berhubungan dengan ide-ide Neoliberalisme, serta sumber-sumber yang terkait dengan Undang-Undang dan kebijakan ekonomi Indonesia.. Beberapa literatur penulis miliki sendiri, dan juga meminjam dari berbagai perpustakaan yang ada. Penulis juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber data yang lain.

Adapun mengenai analisis data, penulis menggunakan metode induktif atas berbagai materi tulisan dengan mencari hal-hal khusus yang tampak dari beberapa referensi yang dibaca. Beberapa data yang diperoleh dari banyak literatur penulis kumpulkan dan dianalisa dengan cara membandingkan serta melakukan seleksi.

H. Sistematika Penulisan

BAB I

Bab ini merupakan bab pengantar yang berisi Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Kerangka Dasar Pemikiran, Hipotesa, Metodologi Penulisan, Jangkauan Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II

Bab ini menguraikan tentang profil Joseph E. Stiglitz beserta pemikirannya lebih lanjut berikut pengaruh dan perkembangannya.

BAB III

Bab ini menguraikan tentang mengapa terminologi-terminologi yang ada pada globalisasi saat ini seperti perdagangan bebas yang dikaitkan dengan ratifikasi undang-undang perdagangan Hak Kekayaan intelektual, kepemilikan terhadap sumber-sumber informasi, serta pelaku agen dalam privatisasi, tidak mampu berjalan dengan baik dan kerap menimbulkan permasalahan di negara-negara berkembang seperti Indonesia.

BAB IV

Bab ini akan mengoreksi kebijakan-kebijakan ekonomi Indonesia pada masa setelah Orde Baru. Lalu dilanjutkan dengan menjelaskan tentang bagaimana seharusnya langkah-langkah yang diambil oleh para pengambil kebijakan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi untuk kemudian menjadi pemenangnya.

BAB V

Bab ini berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya.